

DIALEKTIKA-INHARMONI PEMIMPIN FORMAL DAN NON FORMAL DALAM GELIAT PEMBAGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur)

WIRASANDI

Dosen FKIP Universitas Gunung Rinjani
Selong, Lombok Timur

email : sandiwira05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara deskriptif-faktual atas segala fenomena dalam masyarakat pedesaan di wilayah kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah studi fenomenologis. Dimana data yang dihasilkan adalah data realistic fenomenologis meliputi tindakan, motif tindakan serta nilai-nilai kepribadian dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah : Sering kali keputusan dari pemimpin formal (kepala desa), yang sudah jelas hukum formalnya dapat dengan mudah dimentahkan oleh arti dari nilai sebuah adat. Persepsi masyarakat yang bergantung dari pemanfaatan hutan sebagai bagian dari alur hidup banyak dipengaruhi oleh hukum adat. Persepsi tentang kelestarian menurut adat seringkali berbenturan dengan hukum adat formal yang dipegang oleh kepala desa. Namun dalam prakteknya hal ini tidak pernah menuai kontroversi antara pemimpin formal dan pemimpin non-formal. Pemimpin non formal dilibatkan sebagai katup penyelamat untuk berbicara menyangkut kepentingan hak-hak masyarakat adat di daerah. Pemimpin formal di wilayah kabupaten Lombok Timur sadar dengan posisi kuat yang dimiliki oleh setiap tokoh adat yang memegang peran penting dalam setiap dimensi dinamika masyarakat di masing-masing wilayah di kabupaten Lombok Timur. Sehingga dengan arif pemimpin formal harus tetap mau "berbagi" kuasa dengan para pemimpin non formal (adat) demi tetap terselenggaranya pemerintahan desa yang baik. Sehingga keterlibatan para pemimpin non formal selalu dilibatkan dalam hal penentuan hak-hak masyarakat desa. Disisi lain hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh masyarakat. Meminjam teori cosser dengan istilah "katup penyelamatnya", keterlibatan pemimpin non-formal dalam hal ini tokoh adat dianggap sebagai katup penyelamat oleh sebagian besar masyarakat desa di wilayah kabupaten Lombok timur.

Kata Kunci : Dialektika-Inharmoni, Pemimpin Formal, Non Formal

ABSTRACT

This study aims to reveal the factual basis for any descriptive-phenomenon in rural communities in East Lombok regency. This research is a phenomenological study. Where data is data generated realistic phenomenological includes actions, motives for action as well as the values of personality in society. The results of this study are: Often the decision of formal leaders (village head), the obvious formal law can easily be countered by a sense of the value of a custom. The public perception that relies on the use of forests as part of the flow of life is heavily influenced by customary law. Perceptions about sustainability as the custom is often in conflict with customary law formally held by the village head. However, in practice this is never the controversy between the leaders of non-formal and formal leaders. Non-formal leaders involved as a safety valve to speak concerning the interests of indigenous peoples' rights in formal daerah. Pemimpin in East Lombok district aware of the strong position held by any traditional leader plays an important role in every dimension of community dynamics in each region in East Lombok district. So wisely formal leaders must remain willing to "share" power with the leaders of non-formal (traditional) in order to remain a

good implementation of the village administration. So that the involvement of non-formal leaders are always involved in determining the rights of the villagers. On the other hand it is considered as a good thing by the community. Borrowing theory cosser with the term "valve rescuer", the involvement of non-formal leaders in this custom figure regarded as a safety valve by most rural region of eastern Lombok district.

Keywords: In-harmony Dialectics, Formal Leader, Non-Formal

PENDAHULUAN

Program-program pembangunan saat ini banyak difokuskan di daerah-daerah pedesaan. Perhatian yang besar terhadap daerah pedesaan didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Selain itu program pembangunan di daerah pedesaan dilakukan untuk mengimbangi laju perkembangan pembangunan di daerah perkotaan. Hal tersebut juga menjadi sesuatu yang saat ini mulai dan bergema pada masyarakat pedesaan di kabupaten Lombok timur. Dalam interatraksi atas tindakan, motif masyarakat dalam membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang lebih baik, sangat banyak dipengaruhi oleh peran dari pemimpin formal dan non formal (tokoh adat) di daerah tersebut.

Program-program dari pemerintah tersebut kemudian disalurkan melalui birokrasi pedesaan dan dilaksanakan atas dasar pengawasan desa. Program pembangunan membutuhkan penanganan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Untuk dapat mensukseskan program pembangunan selain dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat juga dibutuhkan pemimpin yang bersedia tampil dalam setiap pembangunan baik itu pemimpin formal maupun pemimpin non formal.

Keberhasilan pembangunan pedesaan di kabupaten Lombok Timur ditentukan oleh beberapa hal diantaranya keterlibatan masyarakat dan kemampuan serta keterampilan pemimpin-pemimpinnya didalam menggerakkan semangat pembangunan. Selain peran kepala desa sebagai pemimpin formal terdapat pemimpin informal yang sering disebut kepala adat

yang sangat pengaruh terhadap pembangunan desa kedua pemimpin ini merupakan ujung tombak dari terlaksananya pembangunan desa. Pemimpin adat dan pemimpin formal menjaga dan menegakkan nilai-nilai adat tradisional yang diyakini kebenarannya, dan saling bekerja sama guna membina dan meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan didesa dalam hal tersebut maka pada hakikatnya dalam pembangunan didesa diwilayah kabupaten Lombok Timur diperlukan kerjasama pemimpin formal dan pemimpin non formal yang dapat bersinergi dengan baik dalam bingkai inharmonis dialektika kedua pemimpin dalam desa dalam geliat pembangunan masyarakat pedesaan.

Kepemimpinan

Pemimpin memiliki makna kemampuan seseorang yang diberi kekuasaan dan wewenang untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan dapat dibedakan sebagai kedudukan dan sebagai proses sosial. Dari sudut kedudukan, kepemimpinan adalah suatu kompleks dari hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang. Dari sudut proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindak yang dilakukan seseorang atau kelompok yang menyebabkan respon gerak dari masyarakat.

Kepemimpinan terbangun dari kemampuan seseorang dan mendapat pengakuan masyarakat. Sifat kepemimpinan ada dua, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Perbedaan antara keduanya didasarkan pada landasan gerak, kepemimpinan formal dalam pelaksanaannya harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi sehingga daya cakupnya terbatas; sementara kepemimpinan informal didasarkan pada pengakuan dan

kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga memiliki ruang lingkup tanpa batas-batas resmi.

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, kepemimpinan dalam ruang lingkup formal maupun non formal.

Fungsi Kepemimpinan

Menurut **Ngalim Purwanto** mengatakan bahwa seorang pemimpin memiliki berbagai fungsi yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu:

- 1) Pemimpin sebagai pelaksana.
- 2) Pemimpin sebagai perencana.
- 3) Pemimpin sebagai seorang ahli.
- 4) Mewakili kelompok dalam tindakan ke luar.
- 5) Mengawasi hubungan antar anggota kelompok.
- 6) Bertindak sebagai pemberi ganjaran dan hukuman.
- 7) Bertindak sebagai wasit dan penengah.
- 8) Pemimpin sebagai lambang daripada kelompok.
- 9) Pemimpin sebagai pemegang tanggungjawab para anggota kelompok.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi kepemimpinan sangat komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepertanggung-jawaban

Teori Kepemimpinan dan Tipe-tipe Kepemimpinan

Beberapa teori telah dikemukakan para ahli untuk mendefinisikan bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Di antara berbagai teori mengenai lahirnya pemimpin, ada tiga teori yang cukup menonjol.

1) Teori Genetik

Dalam pandangan genetic theory, disebutkan bahwa "leaders are born and not made". Para penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin ada bukan karena ia dilahirkan dengan bakat memimpin. Keadaan atau situasi bukan dianggap sebagai faktor penentu lahirnya seorang pemimpin. Seseorang akan menjadi

pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya, takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin.

2) Teori Sosial

Sementara menurut pandangan social theory, memandang dengan arah yang berkebalikan dengan teori yang pertama. Para penganut teori ini berpegangan pada tesis bahwa "leaders are made and not born". Teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu.

3) Teori ekologi

Teori lain tentang pemimpin adalah ecology theory. Teori ini merupakan perpaduan dari kedua teori di atas. Teori ini menilai bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat-bakat ini kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan diri lebih lanjut.

Teori kepemimpinan tersebut diatas merupakan suatu teori dialektika dalam kepemimpinan dari teori genetik yang bertentangan dengan teori sosial yang kemudian melahirkan teori ekologi.

Jika dilihat dalam klasifikasi tipe, ada lima jenis pemimpin. Yang pertama adalah tipe pemimpin otokratik, tipe pemimpin militeristik, tipe pemimpin paternalistik, tipe pemimpin karismatik dan tipe pemimpin demokratis.

a. Pemimpin Otokratik

Dalam pengertiannya, tipe pemimpin otokratik berpandangan bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Hal ini dapat dilihat dari ciri-cirinya yang antara lain; menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi dan mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Tipe pemimpin ini juga memandang bahwa bawahan adalah alat semata dan tidak mau menerima kritik, saran serta pendapat dari orang lain karena menganggap diri sebagai yang paling benar. Pemimpin otokratik juga selalu bergantung pada kekuasaan formal. Metode yang digunakan pemimpin tipe ini untuk

menggerakkan bawahan menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. Itu mengapa tipe pemimpin ini dianggap tidak cocok diterapkan dalam organisasi modern.

b. Tipe Militeristik

Tipe pemimpin berikut adalah tipe militeristik. Namun penting untuk dipahami bahwa tipe pemimpin militeristik tidak bisa diasosiasikan dengan pemimpin dalam organisasi militer. Pemimpin bertipe militeristik akan memiliki beberapa ciri-ciri. Corak pertama adalah perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. Ciri berikut, pemimpin tipe ini akan menggerakkan bawahan dengan menggunakan pendekatan pangkat dan jabatannya. Pemimpin militeristik juga senang dengan formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan serta anti kritik. Jenis pemimpin militeristik juga sangat menggemari berbagai upacara formal untuk menegaskan kepemimpinannya.

c. Tipe Paternalistik

Tipe pemimpin paternalistik ciri ini menggunakan pengaruh yang bersifat kepatuhan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Kadang-kadang pendekatan yang dilakukan sifat terlalu sentimentil. Sifat-sifat umumnya adalah menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa yang berakibat timbulnya sikap yang terlalu melindungi bawahan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan tipe pemimpin ini jarang memberikan kesempatan kepada bawahan serta kesempatan untuk mengembangkan inisiatif daya kreasi. Karena menganggap dirinya maha tahu, maka sangat jarang ada pelimpahan wewenang kepada bawahan.

d. Tipe Karismatik

Jenis pemimpin karismatik sering didefinisikan sebagai individu yang memiliki daya tarik yang amat besar, dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan para pengikut tipe ini agak sulit menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin seperti ini. Seiring kurangnya seorang pemimpin yang bertipe

karismatik, maka sering dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib. Syarat seperti kekayaan dan strata pendidikan tidak dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin karismatik.

e. Tipe Demokratis.

Tipe pemimpin terakhir dikenal sebagai jenis pemimpin demokratis. Tipe pemimpin demokratis dianggap sebagai tipe yang terbaik. Hal ini disebabkan karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu. Ciri yang terlihat antara lain adalah usaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan organisasi. Tipe pemimpin ini juga senang menerima saran, pendapat dan bahkan dari kritik bawahannya. Dalam proses kepemimpinan, pemimpin demokratis juga lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan.

Dari berbagai tipe kepemimpinan yang ada semua tipe kepemimpinan bersifat relatif, namun tipe kepemimpinan yang paling ideal untuk masyarakat moderen sekarang ini adalah tipe kepemimpinan yang demokratis.

Pemimpin Formal

Walgito (2003 : 93) mengungkapkan bahwa pemimpin formal” adalah orang yang menjadi pemimpin karena ”legalitas”-nya. Misalnya, karena ia terpilih secara sah melalui pemilu, atau kongres, atau muktamar, atau apa pun namanya. Yang bersangkutan telah memenuhi semua peraturan yang ada.

Sedangkan Anonim (2006), pemimpin formal adalah pemimpin yang secara resmi diberi wewenang/ kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu, dan dia mempertanggungjawabkan kekuasaan/wewenangnya tersebut pada atasannya. Pemimpin formal pada umumnya berada pada lembaga formal juga, dan keputusan pengangkatannya sebagai pemimpin berdasarkan surat keputusan yang formal. Seorang pemimpin formal bisa saja hanyalah seorang kepala yang memiliki wewenang sah berdasarkan ketentuan formal untuk mengelola anggotanya, atau jika dalam organisasi memiliki wewenang untuk

membawahi dan memberi perintah pada bawahan-bawahannya.

Seorang kepala adalah juga seorang pemimpin apabila dia diterima secara ikhlas oleh para anggotanya dan dia mampu mempengaruhi para anggota sehingga mereka dengan pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti dan mentaati pemimpin tersebut. Seorang pemimpin formal biasanya dinilai oleh bawahannya/ masyarakatnya berdasarkan hasil-hasil yang dicapainya (prestasi). Dengan demikian pengakuan bagi seorang pemimpin formal oleh bawahannya/ masyarakatnya disamping ditentukan oleh jiwa kepemimpinan (leadership) juga oleh prestasi yang mana hal ini berkaitan dengan pengetahuannya tentang kebutuhan masyarakat dimana dia ditempatkan.

Mardikanto (1991 : 205), pemimpin formal adalah pemimpin yang di samping memperoleh pengakuan berdasarkan kedudukannya, juga memang memiliki kemampuan pribadi untuk memimpin (kepemimpinan) yang andal,

Berdasarkan macam kegiatannya pemimpin formal lebih baik memimpin pada kegiatan ekspresif dan kegiatan instrumental. Kegiatan ekspresif, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan normatif dan sosial, seperti : keagamaan/ kepercayaan, kesetiakawanan sosial, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan instrumental adalah kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dan alokasi sumberdaya, seperti : pertanian, industri, dan lain-lain. Contoh berbagai pemimpin formal adalah kepala desa, kepala RT dan RW.

Dari pengertian tersebut diatas maka pemimpin formal adalah pemimpin yang dipilih secara legalitas atau yang diberi wewenang dan kekuasaan yang sesuai dengan prestasi yang dimilikinya.

Pemimpin Non formal

Darmaputera (2004), pemimpin non formal tidak menjadi pemimpin karena faktor legalitas, tapi terutama karena faktor "legitimitas". Artinya, walaupun tak ada kongres atau muktamar yang menetapkan

demikian, tapi rakyat dan umat dengan spontan menerima dan memperlakukan yang bersangkutan sebagai pemimpin mereka. pemimpin informal itu ditetapkan oleh umat bukan dengan surat suara, tapi dengan kata hati. (suara batin). Ikatan antar mereka tidak diatur secara resmi, tapi lahir secara spontan karena ada rasa hormat dan cinta yang tidak dipaksa-paksa.

Anonim (2006), pemimpin informal adalah pemimpin yang tidak diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan tertentu. Dia memperoleh kekuasaan / wewenang karena pengaruhnya terhadap kelompok. Apabila pemimpin formal dapat memperoleh pengaruhnya melalui prestasi, maka pemimpin informal memperoleh pengaruh berdasarkan ikatan-ikatan psikologis. Tidak ada ukuran obyektif tentang bagaimana seorang pemimpin informal dijadikan pemimpin. Dasarnya hanyalah oleh karena dia pernah benar dalam hal tertentu, maka besar kemungkinan dia akan benar pula dalam hal tersebut pada kesempatan lain. Di samping penentuan keberhasilan pada masa lalu, pemilihan pemimpin informal juga ditentukan oleh perasaan simpati dan antipati seseorang atau kelompok terhadapnya.

Sedangkan Walgito (2003 : 93) menyatakan bahwa, pemimpin informal adalah pemimpin yang mempunyai batas-batas tertentu dalam kepemimpinannya. Pemimpin informal adalah orang yang memimpin kelompok informal yang statusnya tidak resmi, pada umumnya tidak didukung oleh peraturan-pertaturan yang tertulis seperti pada kelompok formal. Selanjutnya Sarwono (2005 : 44 & 46), pemimpin informal dapat dikatakan sebagai ciri kepribadian yang menyebabkan timbulnya kewibawaan pribadi dari pemimpin dan merupakan bakat/ sifat/ karismatik yang khas terdapat dalam diri pemimpin yang dapat diwujudkan dalam perilaku kepemimpinan contoh pemimpin non formal adalah kepala adat

Dari pengertian tersebut diatas maka pemimpin non formal adalah pemimpin yang dipilih secara legitimitas atau yang diberi wewenang dan kekuasaan yang berdasar pada ikatan psikologis.

Perbedaan Pemimpin Formal dan Pemimpin Non formal

Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Jadi dengan kata lain Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang. Dapat dijabarkan bahwasannya perbedaan antara Kepemimpinan Formal dan Kepemimpinan Non Formal :

- 1) Kepemimpinan Formal adalah Jabatan yang dimiliki seseorang dalam kemampuannya meliputi proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Dimana Kepemimpinan Formal dalam jabatannya diperoleh dari suatu usaha tertentu dalam pencapaiannya.
- 2) Kepemimpinan Non Formal (Informal) adalah Jabatan yang dimiliki seseorang dalam kemampuannya meliputi proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan tertentu, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Dimana Kepemimpinan Non Formal dalam jabatannya diperoleh tanpa suatu usaha tertentu dalam pencapaiannya.

Pembangunan Desa

a) Pengertian Pembangunan

Dalam konteksnya yang luas, pembangunan mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda pula. Beberapa pengertian pembangunan tersebut ialah :

- 1) Pembangunan adalah perubahan.
Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak ada satu pun segi kehidupan yang luput dari usaha

pembangunan. Adalah hal yang tepat dan wajar apabila ide pertumbuhan mendapat penekanan dan soortan dalam pembangunan.

- 2) Pembangunan adalah pertumbuhan
Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak ada satu pun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan. Adalah hal yang tepat dan wajar apabila ide pertumbuhan mendapat penekanan dan soortan dalam pembangunan.
- 3) Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan
Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan dan berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional. Satu kondisi ideal yang merupakan salah satu sasaran pembangunan ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.
- 4) Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi
Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apapun tujuannya, apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.
- 5) Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa
Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari

negaranegara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh yang absolut”, yang setelah selesai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti keadilan sosial, kemakmuran yang merata, perlakuan yang sama di mata hukum, kesejahteraan material, mental dan spiritual, kebahagiaan untuk semua, ketentraman, dan keamanan.

Dari berbagai pengertian pembangunan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan, perkembangan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan.

b) Pembangunan Desa

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984:15, Yuliati, 2003: 24)

Sedangkan bila ditinjau dari sudut geografis, desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Talidziduhu Ndraha (2003:24-25) ciri-ciri khas yang diperoleh dari gambaran khas pembangunan desa adalah:

a. Membangun masyarakat desa berarti membangun masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

- b. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat desa bersangkutan dalam proses pembangunan proyek, pembangunan itu bukanlah pembangunan desa.
- c. Metode pendekatan pembangunan desa adalah metode yang telah disesuaikan dengan kondisi-kondisi psikologis, sosial dan ekonomi pada setiap lingkungan kebudayaan dimana desa berada.
- d. Proses pembangunan desa adalah usaha berencana dan diorganisasikan guna membantu anggota masyarakat untuk memperoleh sikap, keterampilan dan pengertian yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
- e. Pembangunan masyarakat bermaksud membangun rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri.
- f. Pembangunan masyarakat berarti pembangunan swadaya, mengintensifkan partisipasi masyarakat, meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat untuk selanjutnya dapat berkembang sendiri meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat.
- g. Membangun pedesaan berarti juga membangun prakarsa dan lingkungan yang serasi. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa adalah merupakan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara keseluruhan, dalam hal ini disebut sebagai swadaya murni. Suatu pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama bukan merupakan swadaya murni.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bintoro dalam Patton (2005) bahwa jiwa semangat gotong royong yang sudah merupakan pola hidup bangsa Indonesia dan melambangkan itu merupakan suatu kekuatan sendiri, khusus dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal lainnya dalam kaitannya dengan pembangunan desa, maka perlu disoroti pendapat Bryant dan White dalam Patton (2005) yang menyatakan

bahwa, peran mendasar administrator pembangunan pedesaan adalah menyeleksi proses dan organisasi yang paling cocok untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan. Seorang administrator sebenarnya dapat memilih cara "pendekatan dari atas" yang lebih efisien dalam pelaksanaan kebijakan, karena segala sesuatu disampaikan secara langsung. Kemungkinan lain dia juga dapat memilih suatu pendekatan yang mengarah pada penggerakan peningkatan produksi dengan lebih banyak memperhatikan strategi dari bawah yang partisipatif. Namun yang tidak boleh dilakukan adalah menghindari dua ekstrim, yaitu angkat tangan yang pesimistik ketika mereka "diserang" untuk mengatasi masalah pembangunan yang timbul di tengah masyarakat, serta pendekatan gaya plester band-aid untuk memandang persoalan pada jangka waktu pendek saja.

Pembangunan desa di Indonesia adalah suatu program untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin yang merupakan suatu gerakan untuk kemajuan dalam mewujudkan masyarakat Pancasila. Berdasarkan SK Mendagri tanggal 27 Maret 1969 Nomor 42/1969 tentang berlakunya nilai dasar dan operasional pembangunan masyarakat desa yang antara lain dicerminkan pula mengenai pola pokok kebijakan di bidang pembangunan masyarakat desa sebagai berikut (Baratha dalam Patton, 2005):

- a. Berdasarkan atas swadaya masyarakat.
- b. Bahwa swadaya masyarakat harus menjadi dasar dari kegiatan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. Swadaya masyarakat harus dapat lebih dikembangkan oleh usaha-usaha pembangunan masyarakat desa (PMD) menjadi riil dan dinamis.

Pembangunan desa adalah merupakan proses perubahan masyarakat dari tradisional kemoderen yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut.

c) Peranan Pemimpin Formal

Setiap pemimpin memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang mesti dijalankan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam metode kepemimpinannya. Tugas, wewenang dan kewajiban ini juga dibedakan jika mengacu pada jenis pemimpin yang hadir di dalam masyarakat; yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Maka tugas, wewenang dan kewajiban pemimpin dapat dibedakan dengan mengacu pada pelaksanaan hal-hal tersebut.

- 1) Pemimpin formal memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan juga bertugas untuk memimpin rapat dan musyawarah dalam kerangka mekanisme koordinasi dengan pemerintah lebih tinggi.
- 2) Pemimpin formal juga bertanggungjawab untuk mengelola administrasi dan mengurus masalah di kalangan masyarakat yang terkait dengan kebijakan administratif birokrasi. Wewenang yang dimiliki oleh pemimpin formal misalnya adalah menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 3) Pemimpin formal juga bertugas mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Ia juga merupakan wakil desanya di dalam dan di luar pengadilan serta berhak untuk menunjuk kuasa hukum yang akan mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemimpin formal juga berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Pemimpin formal berkewajiban untuk segenap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan hidup yang demokratis.
- 6) Pemimpin formal juga dituntut untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan

desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

- 7) Pemimpin formal menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa dan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

Peranan pemerintah formal adalah mengatur segala keperluan masyarakat yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

d) Peranan Pemimpin Non Formal

Peranan pemimpin non formal dalam pembangunan desa dapat dilihat dalam pelaksanaan yaitu :

1. Pembangunan Fisik

a) Perencanaan Pembangunan

Dalam pembangunan, perencanaan sangat perlu karena tanpa adanya suatu perencanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan begitu saja. Siswanto (2005:45) mengatakan bahwa perencanaan adalah sebagai suatu yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, dalam perencanaan pembangunan kepala adat sangat besar pengaruhnya, karena pemimpin non formal adalah mediator pertama yang harus dilibatkan, tanpa adanya peran kepala adat program pembangunan tidak dapat berjalan.

b) Pelaksanaan Pembangunan

Salah satu peran kepala adat pada pelaksanaan pembangunan atau gotong royong adalah menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama dengan baik dan mendorong semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. pemimpin non formal berperan aktif

demi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan kearifan lokal daerah setempat.

2. Pembangunan Non Fisik

a) Melestarikan nilai-nilai budaya

Melestarikan nilai budaya merupakan ekspresi kehidupan manusia, dengan kata lain kebudayaan dapat diartikan hasil kebudayaan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu harus mampu melestarikan nilai-nilai budaya yang masih ada agar tetap terjaga dari segala macam bentuk pengaruh.

b) Memberdayakan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat

Memberdayakan nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu keharusan bagi masyarakat adat, karena adat istiadat merupakan aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dan bersifat mengikat bagi masyarakat adat. Seiring dengan berkembang pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat adat semakin berubah terutama padangkalangan anak muda.

c) Mempertahankan eksistensi adat istiadat dari pengaruh budaya asing yang hadir di lingkungan kehidupan masyarakat adat.

Bila ditinjau lebih jauh dari sistem kepemimpinan kepala suku dalam masyarakat harus memiliki ciri-ciri spesifik yang memperjuangkan kesejahteraan umum, menegakkan keadilan dan kebenaran, serta menjaga keselamatan bagi warganya.

Injeksi sistem kepemimpinan formal ke dalam sistem kepemimpinan tradisional mengakibatkan lahirnya dualisme kepemimpinan di dalam masyarakat. Dualisme kepemimpinan non formal dan formal berimbang pada kebingungan dalam masyarakat desa. kepemimpinan non formal yang memiliki legalitas atas ciri-ciri dan

kredibilitasnya dalam arena perpolitikan di masyarakat, sementara kepemimpinan formal diterima dan diakui begitu saja tanpa adanya suatu pengujian legitimasi secara adat dalam masyarakat

Kepemimpinan non formal yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat mulai tergeser dengan kehadiran kepemimpinan formal yang diturunkan oleh pemerintah yang diimplementasikan melalui program pembangunan di kampung, distrik, kabupaten, dan lainnya sehingga secara otomatis pengaruh kepemimpinan kepala-kepala suku yang orientasinya kepada kesejahteraan umum, menegakkan keadilan dan kebenaran, serta menjaga keselamatan bagi warganya semakin menurun dan mulai menyaksikan kepemimpinan formal (Kepala Kampung, Kepala Distrik, Bupati, Gubernur, DPR dan lain sebagainya) dengan implementasi program pembangunan, sementara kepemimpinan kepala suku implementasinya dengan kapabilitas yang dimilikinya lebih cenderung mengutamakan kesejahteraan warga melalui kejujuran, keadilan dan kebenaran sesuai adat istiadat masyarakat setempat, semuanya dilakukan dengan nurani yang polos tanpa ambisi radikal menjadi pemimpin non formal. Lain halnya dengan kepemimpinan formal (Kepala Kampung, Kepala Distrik, Bupati, DPR dan lain sebagainya) selalu dengan ambisi untuk naik ke level yang lebih tinggi, juga mencari masa melalui politik yang mengarah kepada korupsi, kolusi dan nepotisme yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat adat.

Peranan pemerintah non formal adalah mengatur segala kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan fisik dan non fisik guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

METODE ANALISIS

Adapun jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif murni.

Karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih

banyak digunakan untuk penelitian dengan bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisa lebih bersifat kualitatif (Sugiono, 2012 : 11).

Sedangkan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Fenomenologis dengan jenis data yang dihasilkan realistic fenomenologis, artinya data yang dihasilkan merupakan ekstraksi dari segala gejala sosia yang timbul dalam setiap reaksi dalam dinamika masyarakat (Salim, 2006 : 171). Ada pun Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, studi kepustakaan dan Dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Verivication (penarikan kesimpulan). Dengan melalui beberapa teknik keabsahan data yang digunakan yakni berupa validitas internal (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan), validitas eksternal, kebergantungan dan kepastian.

PEMBAHASAN

Dialektika-inharmoni peranan Pemimpin Non-formal dan Formal

Dialektika-inharmoni hubungan antara pemimpin formal dan pemimpin non formal yaitu secara bersama-sama, saling membantu satu sama lain dalam pembangunan desa, karena dari kerjasama yang baik, pembagunan di desa akan berjalan sebagai mana mestinya yang diharapkan masyarakat dan pemerintah.

Hubungan kerja antara pemimpin non formal dan pemimpin formal paling dominan terlihat dalam hal-hal berikut :

a. Pemimpin non formal cenderung mengambil keputusan tentang hak-hak adat.

Hampir dalam setiap sisi kehidupan manusia di wilayah pedesaan di kabupaten Lombok timur sangat tidak bisa dilepas dari peran pemimpin adat. Usia ketokohan adat adalah faktor determinan dalam skala pengaruh dari setiap keputusan yang diambil oleh

pemimpin formal. Hal tersebut terlihat jelas pada masyarakat desa di wilayah kabupaten Lombok timur terutama masyarakat desa terutama masyarakat yang berada dipinggiran yang berbatasan dengan wilayah hutan (desa-desa penyangga hutan) di kabupaten Lombok timur.

Sering kali keputusan dari pemimpin formal dalam hal ini kepala desa, yang sudah jelas hukum formal yang dipetik dari aturan pemerintah dapat dengan mudah dimentahkan dan dilabrak oleh arti dari nilai sebuah adat. Persepsi masyarakat desa di wilayah Lombok timur yang banyak dipengaruhi oleh hukum adat sangat banyak bergantung dari pemanfaatan hutan sebagai bagian dari alur hidup. Persepsi tentang kelestarian menurut adat seringkali berbenturan dengan hukum adat formal yang dipegang oleh kepala desa sebagai ujung tombak pelaksana segala kebijaksanaan pemerintah.

Sedangkan pada masyarakat pesisir di wilayah kabupaten Lombok timur, pun tidak jauh dari kesan pelabrakan akan aturan-aturan pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam hal ini berada dalam kewenangan penuh dari pemimpin formal. Sebut saja pemanfaatan berbagai sarana pemerintah yang sesungguhnya secara aturan tidak diperbolehkan untuk digunakan, namun atas nama proses pelestarian nilai adat aturan formal tersebut harus mentah ditangan pemimpin non-formal.

Ironisnya hal ini tidak pernah menuai kontroversi panas antara pemimpin formal dan pemimpin non-formal di wilayah kabupaten Lombok timur. Seolah-olah pemimpin formal “belajar untuk buta dan tuli” dengan berbagai sumpah akan jabatan yang diembankan padanya. Bagi para pemimpin formal (kepala desa dan jajarannya), atas nama kepentingan bersama untuk pembangunan masyarakat bagi mereka sah-sah saja. Bentuk elaborasi seperti ini yang lambat laun mengkristal menjadi proses inharmonisasi

pemimpin formal dan non-formal dalam pembangunan masyarakat desa.

- b. Pemimpin non formal dilibatkan di pertemuan tingkat desa, distrik dan kabupaten untuk berbicara menyangkut kepentingan hak-hak masyarakat adat di daerah.

Bagai dua mata uang yang saling melengkapi, pemimpin formal di wilayah kabupaten Lombok timur sadar dengan posisi kuat yang dimiliki oleh setiap tokoh adat yang memegang peran penting dalam setiap dimensi dinamika masyarakat di masing-masing wilayah di kabupaten Lombok timur. Sehingga dengan arif pemimpin formal harus tetap mau “berbagai” kuasa dengan para pemimpin non formal (adat) demi tetap terselenggaranya pemerintahan desa yang baik, dalam rangka pengembangan masyarakat desa kearah yang lebih baik tentunya. Sehingga keterlibatan para pemimpin non formal selalu dilibatkan dalam hal penentuan hak-hak masyarakat desa. Disisi lain hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh masyarakat. Meminjam teori Lewis Cosser dengan istilah “katup penyelamatnya”, keterlibatan pemimpin non-formal dalam hal ini tokoh adat dianggap sebagai katup penyelamat oleh sebagian besar masyarakat desa di wilayah kabupaten Lombok timur. Bagi sebagian besar tokoh adat (pemimpin non-formal) adalah alat/ sarana dalam tubuh masyarakat itu sendiri dalam mengontrol dan bila diperlukan dapat difungsikan untuk mengintervensi kepentingan mereka atas pemimpin formal.

Dari kerjasama antar pemimpin formal dan non-formal tersebut maka pembangunan di desa di wilayah kabupaten Lombok Timur berjalan dengan baik, dalam upaya penyegaraan penyamaan tingkat kesejahteraan masyarakat desa dengan masyarakat kota/ kearah pewujudan masyarakat yang madani. Hal yang paling jelas kelihatan dari kedua pemimpin (formal

dan non-formal) tersebut adalah terjalannya komunikasi yang baik.

Adapun Komunikasi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat pedesaan di wilayah kabupaten Lombok timur adalah komunikasi yang bersifat interaktif dan partisipatif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan FAO (FAO, 1975 dalam Nasution, 1996) bahwa penggalangan partisipasi dilandasi adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena di antara orang-orang tersebut saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya.

Dalam menggalang peran serta semua pihak diperlukan :

- 1) Terciptanya suasana yang bebas atau demokratis
- 2) Terbina kebersamaan.

Suasana yang bebas akan memperlancar komunikasi semua pihak. Dengan adanya komunikasi yang komunikatif dan intim, akan terjalin suasana saling asah, saling asuh, dan saling asih, sehingga tergeraklah masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pembaruan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Inharmoni dalam dialektika kepemimpinan di wilayah kabupaten Lombok timur sangat komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepertanggung-jawaban, kepemimpinan terbagi menjadi kepemimpinan formal dan non formal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang dipilih secara legalitas atau yang diberi wewenang dan kekuasaan yang sesuai dengan prestasi yang dimilikinya sedangkan pemimpin non formal adalah pemimpin yang dipilih secara legitimitas atau yang diberi wewenang dan kekuasaan yang berdasar pada ikatan psikologis. Kedua pemimpin tersebut merupakan faktor determinan dalam pembangunan masyarakat desa. Pembangunan adalah suatu proses perubahan, perkembangan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan Dalam pembangunan di desa salah satu faktor yang sangat berpengaruh didalam kesuksesan

pembangunan tersebut adalah adanya kerja sama diantara pemimpin formal dan pemimpin non formal.

2. Saran

Diharapkan bagi pemerintah formal dan pemerintah non formal agar bahu-membahu dalam melakukan pembangunan di desa, karena tanpa kerja sama yang baik pembangunan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006. *Kepemimpinan Masyarakat Adat. Modul Pemberdayaan Masyarakat Adat.* <http://www.ireyogya.org/adat/htm>. Di akses tanggal, 20 November 2015.
- Burhanuddin, 1994. *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan.* Bina Aksara, Jakarta.
- Darmaputera, E. 2004. *Pemimpin Formal, Pemimpin Informal.* *Harian Umum Sore Sinar Harapan*, Sabtu, 03 Juli 2004. www.sinarharapan.com. Di akses tanggal, 20 November 2015.
- Mardikanto, T. 1991. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian.* Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Nasution, Zulkarimein. 1996. *Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya.* Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Kesejahteraan.* Alfa Beta. Bandung.
- Patton, Adri, 2005. *Peran Pemimpin Informal dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di daerah perbatasan Kabupaten Malinau.*
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma.* Yogyakarta : Tiara Wacana.

Sanaba, R., 2000, *Eksistensi Kepemimpinan Tradisional terhadap Proses Birokrasi: kasus desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Maluku Utara*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.

Sugiono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta.

Taliziduhu Ndraha, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta, Jakarta.

Walgito. B. 2003. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Ed. Revisi. Andi Yogyakarta